

# PERANAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PROGRESIF SEBAGAI HUKUM YANG PANCASILAIS

**Eko Wahyudi**

Dosen Fakultas Hukum UPN"Veteran" Jawa Timur

## *Abstraksi*

*Berbicara mengenai upaya pembangunan hukum saat ini di Indonesia bukan persoalan mudah, pertanyaan yang paling krusial adalah darimana kita akan mulai dan harus memulai tentang apa? Kita memahami bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh hukum adalah pencapaian tertinggi dari hukum yaitu hakikat hukum dan keadilan. Tulisan ini mencoba menampilkan aspek politik hukum dalam pembangunan hukum saat ini. Melalui gagasan hukum progresif yang dipelopori oleh (alm) Satjipto Rahardjo, akan diurai bahwa gagasan ini tepat untuk mencapai tujuan hukum di Indonesia. Dengan demikian akan terbangun hukum yang sesuai dengan karakter bangsa, yaitu hukum yang Pancasila.*

**Keyword : Politik Hukum, Pembangunan Hukum, Hukum Progresif**

## **LATAR BELAKANG**

Tidak berlebihan bila disebutkan bahwa negara-negara baru mewarisi banyak hal dari pendahulunya di masa kolonial karena berbagai perubahan tidak dapat menyapu bersih masa lalu. Gambaran ini sangat tepat ditujukan pada kondisi Republik Indonesia sejak diproklamasikannya Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang, disadari atau pun tidak telah mewarisi sisa-sisa tertib hukum kolonial yang terdiri atas struktur serta substansinya (Daniel S. Lev, 1990 : 438). Tradisi meneruskan segala bentuk sisa-sisa tertib hukum masa lalu di Indonesia hingga saat ini sulit dihindari karena lebih dari satu abad "telah berlangsung proses introduksi dan proses perkembangan suatu sistem hukum asing ke/di dalam suatu tata kehidupan dan tata hukum masyarakat pribumi. Sistem hukum yang dimaksud tidak lain adalah sistem hukum Eropa (khususnya Belanda) yang berakar pada tradisi-tradisi hukum Indo Jerman dan Romawi Kristiani, dan yang dimutakhirkan lewat berbagai revolusi sampai dengan revolusi kaum borjuis liberal di Perancis pada akhir abad 19.

Pasca proklamasi kemerdekaan, Indonesia memiliki dua tradisi hukum yang masing-masing terbuka untuk dipilih, yaitu sistem hukum kolonial dengan segala seluk beluknya serta sistem hukum rakyat dengan segala keragamannya. Pada dasarnya dan pada awalnya, pemuka-pemuka nasional mencoba membangun hukum Indonesia dengan mencoba sedapat-dapatnya melepaskan diri dari ide-ide hukum kolonial yang tidaklah mudah. Inilah periode awal dengan keyakinan bahwa substansi hukum rakyat yang selama ini terjajah akan dapat diangkat dan dikembangkan secara penuh menjadi substansi hukum nasional. Tetapi kenyataannya berakhir dengan pengakuan bahwa proses realisasinya ternyata tidak sesederhana model-model idealnya dalam doktrin. Hal itu terjadi karena berbagai kesulitan yang diduga timbul bukan hanya karena keragaman

hukum rakyat yang umumnya tidak secara eksplisit itu, tapi juga karena sistem pengelolaannya sebagai suatu tata hukum yang modern (melihat tata organisasi, prosedur, asas-asas doktrinal penegakannya serta profesionalisme penyelenggaraannya) telah tercipta sepenuhnya sebagai warisan kolonial yang tidak akan mudah dirombak atau digantikan begitu saja dalam waktu singkat.

Terlanjur memilih dan meyakini bahwa akan lebih praktis jika melanjutkan tradisi sistem hukum kolonial yang dianggap telah lebih dipahami serta memiliki struktur yang lebih pasti, ternyata bukan tanpa masalah dalam perjalanannya. Pilihan ini yang merupakan perwujudan dari politik hukum negara kita memunculkan problem baru yaitu masalah fleksibilitas norma tertulis dengan implementasinya pada lembaga peradilan. Rumusan norma hukum yang eksplisit dalam wujud perundang-undangan tidak jarang malah terkesan kaku dan limitatif, meski dalam pengimplementasiannya masih terbuka peluang bagi hakim untuk melakukan interpretasi, mengingat kodifikasi norma hukum apapun memang tercipta dengan kondisi yang selalu tidak lengkap. Oleh karena itu, dalam penerapannya untuk kasus-kasus konkrit di pengadilan, norma atau kaidah hukum itu tidak jarang memunculkan berbagai persoalan yang bermuara pada sulitnya mewujudkan keadilan substansial (*substansial justice*) bagi para pencariannya. Betapa tidak, cara pandang hakim terhadap hukum seringkali amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim hanya menangkap apa yang disebut keadilan hukum (*legal justice*) tapi gagal menangkap keadilan masyarakat (*social justice*). Hakim telah meninggalkan pertimbangan hukum yang berkeadilan dalam putusan-putusannya. Akibatnya kinerja pengadilan sering disoroti karena sebagian besar putusannya masih menunjukkan lebih kental bau “formalisme prosedural” “ketimbang” kedekatan pada rasa keadilan masyarakat”

Sebagai salah satu contoh adalah ilustrasi kasus berikut ini : Minah (55) warga Darmakradenan, Ajibarang, Banyumas, mengambil 3 (tiga) biji kakao senilai Rp 2.100 dari perkebunan PT. Rumpun Sari Antan (RSA) yang akan digunakan Minah sebagai bibit. Belum sempat buah tersebut dibawa pulang, mandor perkebunan yang bernama Sutarno menegurnya. Minah lantas meminta maaf dan minta Sutarno untuk membawa ketiga biji kakao tersebut. Alih-alih permintaan maafnya diterima, manajemen RSA malah melaporkan Minah ke Polsek Ajibarang. Laporan itu berlanjut pada pemeriksaan kepolisian dan berakhir dimeja hijau. Vonis PN Purwokerto tanggal 19 Nopember 2009 : hukuman percobaan 1 bulan 15 hari (45 hari) masa percobaan 3 bulan .

Hukum yang seperti inilah yang didambakan oleh masyarakat kita ? seperti apakah hukum itu yang seharusnya ? serta bagaimana peran politik hukum sebagai perwujudan dari fungsi Negara dalam pembangunan hukum yang berkeadilan? Semua jawaban tersebut akan diulas melalui pembahasan berikut ini

### **Politik Hukum**

Salah satu sisi pandang dari pembangunan hukum di Indonesia adalah dari kacamata Politik Hukum dimana sudah banyak definisi tentang politik hukum yang diberikan oleh para ahli dalam berbagai literatur. Beberapa pendapat tersebut antara lain dari

**Utrecht** : politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan *sosial werkelijkheid* (kenyataan sosial).

**T. Mohammad Radhie :** politik hukum menyangkut persoalan pembaharuan hukum-untuk memahami arah pembangunan hukum di Indonesia terlebih dahulu harus memahami politik hukum nasional yang dianut di negara Indonesia.

Dari berbagai literatur yang ada, maka dapat ditarik substansi yang sama tentang definisi politik hukum dimana bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan Negara”. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan oleh negara yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (Mahfud, 2009 :2)

Mengapa politik hukum diperlukan ?

**Bagir Manan** berpendapat bahwa Politik Hukum diperlukan tiap negara dikarenakan dua hal:

*Pertama*, alasan ideologis atau perubahan sistem politik misalnya dari negara jajahan menjadi negara merdeka.

*Kedua*, adanya perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan misalnya dari sistem monarki ke republik.

Politik hukum dapat dibedakan antara politik hukum yang **permanen (bersifat tetap)** maupun yang **bersifat temporer (tidak tetap)**. Politik hukum permanen berkaitan dengan setiap hukum yang akan selalu menjadi dasar pada setiap pembentukan dan penegakan hukum. Sedangkan politik hukum temporer adalah kebijakan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan.

### **Pembangunan Hukum Progresif**

Membangun berarti membuat sesuatu yang secara nyata tidak ada menjadi ada atau dapat pula berarti memperbaiki sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Tentunya membangun harus mempunyai suatu tujuan dan landasan, dimana tujuan dan landasan dari pembangunan dan seluruh aspek-aspek kehidupan bangsa adalah Pancasila (Otje Salman, 2009 : 11)

Hukum progresif dipelopori oleh pemikiran Begawan Hukum (alm) Satjipto Rahardjo. istilah ini barangkali bukan istilah baru bagi pemerhati hukum, namun demikian kehadirannya disikapi secara berbeda oleh pengemban profesi hukum di negeri ini. Sebagian bisa memahami bisa memahami namun merasa pesimis dan skeptis. Sebagian lagi bahkan menolak dengan sinis mengatakan bahwa gagasan hukum progresif tersebut terlalu idealis dan tidak realistis. Hukum progresif menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur dan cita-cita. Maka dari itu, apabila ada persoalan didalam hukum, yang harus diperbaiki adalah hukumnya, bukan manusia yang justru dipaksa untuk menyesuaikan diri. Disini yang berlaku adalah “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, in the law making* ). Dengan kata lain, hukum bukanlah sesuatu yang final dan selesai. Hukum bukan merupakan institusi yang mutlak dan final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk menjadi tersebut (Satjipto Rahardjo, 2009 : 5)

Jadi yang dimaksud dengan judul “ **peranan politik hukum dalam pembangunan hukum progresif sebagai hukum yang Pancasila**” adalah bagaimana peran negara yang terwujud dalam suatu kebijakan hukum apa yang akan

diberlakukan atau tidak diberlakukan dikaitkan dengan gagasan hukum progresif yang berusaha mewujudkan tujuannya yaitu hukum untuk manusia, sehingga akan tercapai suatu bentuk hukum yang ideal bagi masyarakat kita : hukum berdasarkan falsafah Pancasila.

## PEMBAHASAN

### Hukum Progresif, Hukum yang Pancasila ?

Minah, dimana seharusnya dia bisa hidup dengan damai berkumpul bersama dengan keluarganya, tiba-tiba harus berhadapan dengan kekuasaan hukum gara-gara pencurian 3 (tiga) biji kakao yang telah dilakukannya, padahal ia sudah berusaha meminta maaf. Namun, ternyata hukum malah tidak memberikan maaf, melainkan memberikan *punishment* berupa hukuman percobaan 1 bulan 15 hari.

Kejadian tersebut merupakan salah satu contoh dari sekian banyak kasus ketidakadilan di dunia hukum kita. Setelah kejadian itu, hukum benar-benar dikritisi oleh publik. Masyarakat menganggap bahwa hukum tidak menjalankan fungsi dalam mengaktualisasikan keadilan yang sebenarnya. Hukum hanyalah bunyi undang-undang, hukum tidak mempunyai hati nurani serta mengabaikan moral masyarakat. Hal itu dikarenakan alasan bahwa penegak hukum kita hanya mengacu pada hukum prosedural formal, dimana titik beratnya pada hukum acara yang secara *letterlijk* ada dalam undang-undang. Sehingga mereka tidak mau menciptakan terobosan-terobosan hukum yang secara nyata dampaknya akan lebih menciptakan keadilan substansial daripada keadilan prosedural yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Hal tersebut sangat berbeda dengan pemikiran hukum progresif, dimana dapat dijelaskan melalui urutan pengidentifikasian seperti di bawah ini

No	Identifikasi	HUKUM PROGRESIF
1.	Asumsi	Hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau atau diperbaiki, bukan manusia dipaksa-paksa untuk dimasukkan dalam skema hokum. Hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi ( <i>law as a process, law in the making</i> )
2	Tujuan	Kesejahteraan dan kebahagiaan manusia
3	Spirit	Pembebasan terhadap tipe, cara berfikir, asas dan teori yang selama ini dipakai Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum (administration of justice) yang selama ini berkuasa dan dirasa menghambat usaha hukum untuk menyelesaikan persoalan
4	Progresivitas	Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dan karenanya memandang hukum selalu dalam proses untuk menjadi Peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional maupun global

		Menolak status-quo manakala menimbulkan dekandensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum
5	Karakter	<p>Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku</p> <p>Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat atau bertipe responsif</p> <p>Hukum progresif terbagi paham dengan paham realism, karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan ia dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum</p> <p>Hukum progresif memiliki kedekatan dengan <i>sociological jurisprudence</i> dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas studi tentang peraturan, tapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum</p> <p>Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam, karena peduli dengan hal-hal yang <i>meta-juridical</i></p> <p>Hukum progresif memiliki kedekatan dengan <i>Critical Legal Studies (CLS)</i> namun cakupannya lebih luas</p>

(Sumber : Satjipto Rahardjo, 2009 )

Dari uraian diatas, maka di ikhtisarkan bahwa kekuatan yang memegang dominasi penting dari hukum progresif ini adalah kekuatan moral. Disini, hukum yang tujuan utamanya adalah mengabdikan pada manusia, mengutamakan pertimbangan moral atau perilaku dari pada hanya sekadar *imam-an* pada norma yang positivistik, prosedural-formal. Hukum progresif sebagai salah satu bentuk hukum modern bukanlah semata-mata “realitas yuridis” tetapi juga ”realitas sosiologis” yang saling mempengaruhi dan tidak mensterilkan. Hukum tidaklah bebas dari pengaruh nilai etika, moral, agama dan nilai-nilai sosial-ekonomi-budaya atau lainnya, melainkan pada batas-batas tertentu memang terikat pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hukum harus merupakan aplikasi dari peran penegak hukum yang berkiblat pada keadilan substantif yang lebih dekat pada keadilan masyarakat ketimbang mengkeramatkan pasal-pasal yang sudah tidak *up to date* bagi pengembangan hukum di Indonesia. Hal ini sejalan dengan karakter bangsa yang terjabarkan dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Segala bentuk hukum yang berlaku haruslah tidak bertentangan dengan nilai ketuhanan dalam sila ke-1, nilai kemanusiaan dalam sila ke-2, nilai persatuan dalam sila ke-3, nilai permusyawaratan dalam sila ke-4 serta nilai keadilan sosial dalam sila ke-5. Jadi hukum progresif adalah hukum yang Pancasila.

Salah satu teori yang mendukung hukum progresif ini adalah pendapat dari Gustav Radbruch tentang tujuan hukum adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan (Achmad Ali, 2009:376). Putusan akhir kasus Minah jelas tidak menimbulkan kemanfaatan bagi siapapun khususnya bagi Minah sendiri. Kalau hakimnya berfikir progresif, dia akan melakukan terobosan hukum demi mewujudkan keadilan yang substansial tersebut. Demikian pula jaksa. Apabila jaksa mau berfikir kepada tujuan

kemanfaatan hukum, maka dia akan men-*deponir* kasus tersebut demi kepentingan umum.

### **Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Progresif**

Secara nyata, kalau kita mengatakan bahwa sistem hukum kita mengadopsi sepenuhnya pada sistem hukum kolonial adalah kurang tepat. Karena sistem hukum kita, ibarat makanan, dia adalah “gado-gado”. Selain menganut sistem warisan kolonial, dia juga berusaha mengembangkan gagasan-gagasan progresif. Hal ini wajar ditempuh oleh suatu negara, dikarenakan masih dalam proses pencarian jatidiri sistem hukum yang ideal. Negara melalui politik hukumnya sudah berusaha membawa hukum kita menuju ke proses pembangunan hukum yang dari waktu ke waktu menjadi lebih baik.

Menuju ke perbaikan dan perbaikan. Itulah kata kunci bagaimana wajah dunia hukum di Indonesia saat ini. Kita sadar bahwa perkembangan hukum hendaklah dipandang secara general bukanlah produk final. Hukum bukan harga mati dimana ia harus *flexible* mengikuti dinamika masyarakat. Dengan demikian, hukum kita akan selalu *up to date* pula terhadap perkembangan atau dengan kata lain perkembangan hukum sejalan dengan perkembangan masyarakat. Tepatlah kiranya, seperti teori yang disampaikan oleh Roscoe Pound yang menyatakan bahwa “*law as a tool of social engineering*”

Dengan berpijak pada kerangka diatas, tidaklah heran bila di Indonesia bermunculan undang-undang baru sebagai perbaruan atas undang-undang yang terdahulu atau sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan hukum yang benar-benar baru. Perkembangan ini bukan hanya sebatas pada substansi hukumnya, melainkan juga menyentuh pada kelembagaan hukum. Dalam konteks hukum sebagai suatu proses, bukan tidak mungkin, negara sebagai fasilitator akan melahirkan lembaga-lembaga hukum baru. Hal ini tentu saja dimaksudkan, agar hukum mencapai kondisi yang ideal. Misalkan saja lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengoptimalkan penanganan terhadap tindak pidana korupsi. Contoh lain yaitu lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai sarana hak uji terhadap produk undang-undang bila bertentangan dengan UUD 1945. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan perwujudan dari peran politik hukum dewasa ini.

Bentuk-bentuk lain terutama untuk mengarahkan pemahaman bahwa hukum itu bukan hanya murni hal-hal yang sifatnya *legal prosedural* melainkan *legal substansial* dapat ditemukan pula dalam uraian berikut ini :

- a. **Pancasila**, yang dikomandani sila pertama, jelas menghendaki suatu hukum yang ber-Ketuhanan. Dimana dari nilai-nilai Ketuhanan, hukum haruslah merupakan perwujudan dari nilai keadilan milik rakyat banyak, keadilan sosial yang bisa diterima dan mampu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.
- b. **Pasal 28 D Amandemen UUD 1945** dengan tegas menyatakan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Perumusan norma “**kepastian hukum yang adil**” tersebut jelas mengandung makna kepastian hukum materiil ( *material certainty legality*) yang berbasis pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 (1) UUD 1945
- c. **Undang-Undang No. 4 Tahun 2004**
  - a. Pasal 1 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman : “ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan



peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia

- b. Pasal 3 ayat (2) : Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila
- c. Pasal 4 ayat (1) : Peradilan dilakukan demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- d. Pasal 8 (3) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, “Demi Keadilan dan Kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah”
- e. Pasal 2 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dalam proses pembentukan perundang-undangan juga dengan tegas menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara. Artinya bahwa Pancasila wajib dijadikan landasan ideologis, cita moral, cita hukum, norma pembentuk dan norma penguji keabsahan peraturan perundang-undangan agar lebih mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- f. Dibiidang hukum perdata, pasal 1365 BW juga tidak hanya memaknakan “perbuatan melawan hukum sebatas perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, melainkan lebih luas lagi, ialah bertentangan pula dengan : kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila/moral, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
- g. Pasal 1 RUU KUHP, telah memperluas asas legalitas formal yang dikandung pasal 1 ayat (1) KUHP dengan asas legalitas materiil :
  - (1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
  - (2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.
  - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - (4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Dari uraian tersebut, jelas menunjukkan politik hukum kita sudah memfasilitasi suatu pembangunan hukum progresif meskipun secara kuantitas dan kualitas, dengan cara memperbanyak undang-undang yang berkarakter hukum progresif, masih harus lebih ditingkatkan. Namun, perlu diingat bahwa dalam satu kesatuan sistem hukum dimana selain faktor substansi hukum masih ada faktor penegak hukum dan budaya hukum. Untuk saat ini, dalam rangka pembangunan hukum progresif, ketiga faktor tersebut masih belum berjalan menuju satu tujuan. Apakah artinya substansi hukum yang progresif telah terbentuk namun penegak hukumnya masih berfikir kolot terpaku pada legalistik formal? Apakah artinya hukum yang progresif bila budaya hukumnya masih men-*sakral*-kan dogma bahwa manusia harus berubah untuk hukum ? bukan sebaliknya, hukum berubah untuk manusia ?

Politik hukum kita, khususnya yang bersifat temporer telah mewujudkan suatu paradigma hukum progresif. Hal-hal yang tidak kalah pentingnya terkait dengan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penegak hukum, sebagai palang pintu utama hukum, hendaknya mengaplikasikan gagasan hukum progresif. Oleh karena itu, bagi mereka perlu diadakan suatu pencerahan dalam bentuk pelatihan-pelatihan intensif tentang sosialisasi kekuatan moral hukum progresif sebagai *das sollen*.
2. Dalam jangka panjang, negara melakukan inventarisasi seluruh perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah yang telah dibuat untuk dikaji ulang kesesuaiannya dengan falsafah kita yaitu Pancasila. Tidak harus merubah total undang-undangnya melainkan pasal-pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang harus direvisi.
3. Sosialisasi tentang apa dan bagaimana hukum progresif, bukan hanya kepada publik sebagai tujuan, melainkan juga kepada jajaran eksekutif serta legislatif baik pusat maupun daerah. Hal ini beranjak dari pemikiran bahwa dua fungsi inilah yang memegang peranan terpenting sebagai pembuat peraturan di negara kita.

#### **KESIMPULAN :**

Dari uraian singkat pembahasan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Politik hukum memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan hukum progresif. Hal ini dikarenakan politik hukumlah yang menentukan arah kebijakan tentang hukum yang ideal bagi Indonesia di masa datang.
2. Peran politik hukum secara temporer sudah tercermin dalam bentuk upaya-upaya pemerintah mengaplikasikan karakter/ciri-ciri yang membangun dalam setiap pembentukan perundang-undangan atau dapat berupa meng-evaluasi kembali perundang-undangan yang tidak sesuai dengan cita moral dan falsafah bangsa, dengan acuan utama adalah Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kedepannya, upaya-upaya tersebut harus lebih ditingkatkan lagi.
3. Faktor penegak hukum dan budaya hukum, sebagai bagian tak terpisahkan dalam satu sistem hukum, harus saling menunjang menuju ke pembangunan hukum progresif. Hal ini dikarenakan kondisi dilapangan, mayoritas penegakan hukum kita masih normatif, sehingga sering mengabaikan keadilan substantif yang mencerminkan cita hukum masyarakat. Demikian pula dari sisi budaya hukum, harus lebih intensif memperkenalkan *progresifisme* hukum kepada masyarakat luas dalam bentuk sosialisasi berupa penyuluhan, talk show dan sebagainya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Menguak Realitas Hukum (Rampai Kolom Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum)*, Jakarta, Prenada Media Group, 2008
- Eman Suparman, *Asal-usul Serta Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2008.
- Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Otje Salman, *Kapita Selekta Hukum : Tinjauan Kritis atas Perkembangan Hukum seiring Perkembangan Masyarakat di Indonesia*, Bandung, Widya Padjadjaran, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
- Tim Penulis Pakar Hukum Universitas Padjajaran, *Kapita Selekta Hukum (Tinjauan Kritis Atas Perkembangan Hukum seiring Perkembangan Masyarakat)*, Yogyakarta, Widya Padjajaran, 2009.